



AKSESIBILITAS INFORMASI KEPEMILUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI BAWASLU KOTA SURABAYA

Pinayungan Sitoresmi Sumarsana

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: pinayungan775@gmail.com

ABSTRAK

Aksesibilitas informasi pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas yang masih mengalami berbagai keterbatasan dalam memperoleh informasi publik. Kesetaraan akses terhadap informasi ke pemilu memungkinkan masyarakat memahami hal politik serta berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas informasi pemilu bagi penyandang disabilitas di Surabaya serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam memperoleh informasi ke pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang berkaitan dengan komunikasi publik dan demokrasi inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi pemilu telah dilakukan melalui publikasi digital, dokumentasi kelembagaan, dan aktivitas komunikasi publik. Namun demikian, aksesibilitas informasi masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas akibat keterbatasan media yang ramah disabilitas, kurangnya format informasi alternatif, serta belum optimalnya strategi komunikasi yang inklusif. Dalam perspektif inklusi sosial, keterbatasan akses informasi dapat menyebabkan eksklusi sosial dan rendahnya partisipasi politik kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi publik yang inklusif serta pengembangan media informasi yang aksesibel guna mendukung kesetaraan partisipasi politik dan demokrasi yang inklusif.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Demokrasi, Disabilitas, Informasi Pemilu

ABSTRACT

Accessibility of electoral information is a crucial element in supporting the realization of inclusive democracy, particularly for persons with disabilities who still experience various limitations in obtaining public information. Equal access to election information enables the public to understand their political rights and actively participate in the democratic process. This study aims to analyze the accessibility of election information. The study used a qualitative method with a descriptive approach through observation, documentation, and literature review related to public communication and inclusive democracy. The results show that the dissemination of election information has been carried out through digital publications, institutional documentation, and public communication activities. However, information accessibility still does not fully accommodate the needs of persons with disabilities due to limited disability-friendly media, a lack of alternative information formats, and suboptimal inclusive communication strategies. From a social inclusion perspective, limited access to information can lead to social exclusion and low political participation of vulnerable groups. Therefore, it is necessary to strengthen inclusive public communication and

develop accessible information media to support equal political participation and inclusive democracy.

Keywords: *Accessibility, Democracy, Disability, Election Information*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Keterlibatan warga negara tidak hanya tercermin melalui penggunaan hak pilih pada saat pemilu, tetapi juga melalui kemampuan untuk memperoleh, memahami, serta mengawasi informasi yang berkaitan dengan proses pemilihan. Oleh karena itu, ketersediaan informasi pemilu yang mudah diakses menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang terbuka, partisipatif, dan inklusif [1]. Akses informasi yang memadai memungkinkan masyarakat memahami hak politiknya sekaligus mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses demokrasi.

Meskipun demikian, kemudahan akses terhadap informasi publik belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Berbagai hambatan masih ditemui dalam memperoleh informasi pemilihan, seperti terbatasnya media yang ramah disabilitas, minimnya penyediaan format informasi alternatif, serta belum optimalnya penerapan komunikasi yang inklusif [2]. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi yang pada akhirnya memengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan demokrasi.

Permasalahan aksesibilitas informasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis maupun perkembangan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya yang memiliki keberagaman sosial dan budaya, penyandang disabilitas masih kerap berhadapan dengan berbagai stigma dan stereotip. Sebagian masyarakat masih memandang disabilitas sebagai bentuk keterbatasan individu semata sehingga kebutuhan kelompok disabilitas dalam memperoleh akses informasi belum selalu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan layanan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa hambatan terhadap akses informasi tidak hanya berasal dari keterbatasan sarana dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, serta cara pandang masyarakat terhadap kelompok disabilitas.

Dalam perspektif sosiologi, stigma sosial dapat mendorong terjadinya eksklusi sosial yang menghambat kelompok tertentu untuk memperoleh berbagai sumber daya, termasuk informasi publik. Ketika kebutuhan penyandang disabilitas belum diakomodasi secara optimal dalam proses penyampaian informasi, kesempatan mereka untuk memperoleh informasi secara setara menjadi semakin terbatas. Keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas sosial dan politik, termasuk dalam pengawasan pemilu dan proses demokrasi. Dengan demikian, kajian mengenai aksesibilitas informasi tidak cukup hanya melihat aspek teknis, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang membentuk pengalaman kelompok disabilitas dalam mengakses informasi publik.

Pengalaman penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi publik menunjukkan adanya tantangan yang berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya. Keterbatasan penggunaan bahasa isyarat, kurangnya teks alternatif pada media digital, serta belum optimalnya fitur aksesibilitas lainnya dapat

mengurangi kemampuan penyandang disabilitas untuk memperoleh dan memahami informasi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kesesuaian media dan format informasi dengan kebutuhan pengguna.

Dari sudut pandang sosiologis, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses ruang publik yang seharusnya dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara. Ketika informasi yang disediakan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan kelompok disabilitas, peluang mereka untuk memahami informasi kepemiluan dan berpartisipasi dalam proses demokrasi menjadi lebih terbatas. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses informasi kepemiluan menjadi penting untuk mendukung terwujudnya sistem komunikasi publik yang inklusif dan berkeadilan.

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara penyebaran informasi dan komunikasi publik dilakukan. Kehadiran website, media sosial, dan berbagai platform digital memberikan kesempatan bagi lembaga publik untuk menyampaikan informasi kepemiluan secara lebih cepat dan menjangkau khalayak yang lebih luas [3]. Namun demikian, transformasi digital juga dapat menghadirkan hambatan baru apabila aspek aksesibilitas belum menjadi perhatian utama. Sebagian penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi digital akibat belum tersedianya fitur pendukung seperti audio, bahasa isyarat, teks alternatif, maupun desain tampilan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna disabilitas [4].

Dalam kajian sosiologi, keterbatasan akses terhadap informasi berpotensi menimbulkan marginalisasi sosial terhadap kelompok tertentu. Individu yang tidak memiliki akses informasi yang memadai cenderung mengalami hambatan dalam berpartisipasi pada berbagai aspek kehidupan sosial dan politik [5]. Oleh karena itu, aksesibilitas informasi memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mewujudkan inklusi sosial dan kesetaraan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi publik bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan dalam pelayanan publik di Indonesia. Fitria dan Rahman menemukan bahwa lembaga publik belum sepenuhnya menyediakan sistem komunikasi yang ramah bagi penyandang disabilitas [6]. Temuan serupa disampaikan oleh Putri dan Widodo yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik kelompok disabilitas dalam pemilu [7]. Sementara itu, Wahyuni dan Lestari menegaskan bahwa komunikasi publik yang inklusif merupakan faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat [8]. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji aksesibilitas informasi pemilu pada lembaga pengawas pemilu masih relatif terbatas sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Komunikatif dari Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam ruang publik melalui komunikasi yang rasional dan terbuka [9]. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan konsep modal sosial Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bahwa akses terhadap informasi merupakan salah satu bentuk modal yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan politik [10]. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian

ini bertujuan menganalisis aksesibilitas informasi kepemiluan bagi penyandang disabilitas di Bawaslu Kota Surabaya serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi terwujudnya komunikasi demokrasi yang inklusif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas informasi kepemiluan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Informan penelitian terdiri atas staf Bawaslu Kota Surabaya yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik serta penyandang disabilitas sebagai penerima informasi kepemiluan. Fokus penelitian diarahkan pada penyandang disabilitas sensorik, khususnya tunanetra dan tunarungu, karena kedua kelompok tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan akses terhadap informasi kepemiluan melalui media digital, penggunaan teks alternatif (alt-text), audio, dan bahasa isyarat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, studi literatur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). Observasi dilakukan terhadap aktivitas komunikasi publik dan publikasi digital yang berkaitan dengan penyebaran informasi kepemiluan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan arsip kegiatan, publikasi kelembagaan, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada staf Bawaslu Kota Surabaya dan penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dalam mengakses informasi kepemiluan, hambatan yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap aksesibilitas media informasi yang digunakan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan aksesibilitas informasi, komunikasi publik, inklusi sosial, dan partisipasi politik [11].

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami bentuk aksesibilitas informasi yang tersedia, hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, serta implikasinya terhadap partisipasi politik dan demokrasi inklusif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dalam menyebarkan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui website resmi, media sosial, dokumentasi kegiatan, serta program sosialisasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan pendidikan demokrasi. Pemanfaatan media digital menjadi pilihan utama karena mampu memperluas jangkauan informasi dan mempercepat proses penyampaian pesan kepada masyarakat [12]. Kehadiran teknologi digital juga membuka peluang bagi lembaga publik untuk membangun hubungan komunikasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa dibatasi ruang maupun waktu.

Informasi yang dipublikasikan oleh Bawaslu mencakup berbagai aktivitas kelembagaan, mulai dari sosialisasi pengawasan pemilu, diskusi publik, pendidikan demokrasi, hingga dokumentasi kegiatan pengawasan. Berbagai informasi tersebut disajikan dalam bentuk berita, infografis, foto, video, dan konten digital lainnya. Melalui media digital, masyarakat dapat memperoleh informasi kepemiluan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga. Selain mendukung penyebaran informasi yang lebih luas,

penggunaan media digital juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Pemanfaatan platform digital terbukti membantu memperluas jangkauan komunikasi publik. Informasi mengenai jadwal kegiatan, pengawasan pemilu, edukasi demokrasi, maupun dokumentasi aktivitas kelembagaan dapat diakses secara cepat melalui berbagai media sosial yang dimiliki Bawaslu. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung transparansi kelembagaan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagian besar informasi yang tersedia masih menggunakan format umum sehingga belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan kelompok disabilitas. Keterbatasan penggunaan fitur seperti audio bagi penyandang tunanetra, bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu, maupun teks alternatif pada publikasi digital menjadi indikator bahwa akses informasi belum dapat dinikmati secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat [13]. Akibatnya, kelompok disabilitas masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh informasi kepemiluan secara mandiri.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi informasi tidak secara otomatis menghasilkan komunikasi publik yang inklusif. Walaupun teknologi mampu mempermudah penyebaran informasi, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara merata apabila kebutuhan kelompok rentan belum menjadi perhatian dalam proses penyampaian informasi [14]. Oleh karena itu, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan tersedianya media digital, tetapi juga menyangkut kemampuan lembaga dalam menghadirkan informasi yang dapat dipahami dan dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologis, keterbatasan akses informasi berpotensi menimbulkan eksklusi sosial terhadap kelompok tertentu. Penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam memperoleh informasi akan lebih sulit memahami proses demokrasi serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi memiliki kaitan erat dengan prinsip kesetaraan sosial dan kesempatan berpartisipasi dalam demokrasi. Dengan demikian, aksesibilitas informasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya bersumber dari faktor teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya perhatian terhadap kebutuhan kelompok tersebut dalam praktik komunikasi publik. Sebagian besar media komunikasi masih dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat umum sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan pengguna dengan keterbatasan tertentu. Akibatnya, penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan melalui media digital maupun sarana komunikasi publik lainnya.

Salah satu kendala yang masih ditemukan adalah belum optimalnya penerapan fitur pendukung aksesibilitas, seperti teks alternatif (alt-text), deskripsi gambar, maupun format yang kompatibel dengan aplikasi pembaca layar. Keterbatasan tersebut menyulitkan penyandang tunanetra dalam mengakses informasi secara mandiri sehingga informasi yang tersedia belum dapat dijangkau secara setara oleh seluruh masyarakat.

Selain faktor teknis, rendahnya tingkat literasi digital juga menjadi tantangan dalam pemenuhan akses informasi bagi penyandang disabilitas. Tidak semua individu memiliki kemampuan maupun fasilitas yang memadai untuk memanfaatkan media digital. Sebagian kelompok disabilitas masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan perangkat teknologi akibat minimnya dukungan fasilitas dan kurangnya pelatihan yang sesuai. Situasi tersebut pada akhirnya menciptakan kesenjangan akses informasi antara kelompok disabilitas dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Teori Tindakan Komunikatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, ruang publik yang ideal harus memungkinkan setiap individu berpartisipasi dalam proses komunikasi secara setara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah memanfaatkan berbagai media digital untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Meskipun demikian, kemudahan akses tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Keterbatasan penggunaan bahasa isyarat, teks alternatif (alt-text), maupun format informasi yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas menunjukkan bahwa ruang publik digital yang tersedia masih belum sepenuhnya inklusif.

Berdasarkan perspektif Habermas, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses komunikasi publik belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Aksesibilitas informasi menjadi prasyarat penting dalam menciptakan ruang publik yang terbuka, karena komunikasi yang ideal hanya dapat terwujud apabila seluruh kelompok masyarakat memiliki peluang yang setara untuk menerima, memahami, dan menggunakan informasi yang tersedia. Ketika sebagian kelompok masih menghadapi hambatan dalam mengakses informasi, maka prinsip kesetaraan dalam ruang publik belum sepenuhnya tercapai.

Habermas juga menekankan bahwa komunikasi publik seharusnya menghasilkan pemahaman bersama di antara anggota masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kesetaraan akses terhadap informasi berperan penting dalam mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Sebaliknya, apabila informasi hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, maka akan muncul ketimpangan partisipasi yang berpotensi memperkuat eksklusi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Selain menggunakan perspektif Habermas, penelitian ini juga dianalisis melalui konsep modal sosial Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, akses terhadap informasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk sumber daya sosial yang memengaruhi posisi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan aksesibilitas informasi berpengaruh terhadap kemampuan penyandang disabilitas dalam memahami hak politik, prosedur pemilu, serta mekanisme pengawasan demokrasi. Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam memperoleh modal budaya (cultural capital), yaitu sumber daya yang mendukung individu untuk memahami lingkungan sosial dan berpartisipasi di dalamnya.

Ketika informasi kepemiluan tidak tersedia dalam format yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, peluang mereka untuk memperoleh pengetahuan politik menjadi lebih terbatas dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Akibatnya, kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas politik maupun

pengawasan pemilu juga dapat berkurang. Dengan demikian, aksesibilitas informasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan distribusi sumber daya yang memengaruhi kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam perspektif Bourdieu, kelompok yang memiliki akses informasi lebih baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas jaringan sosial, dan terlibat dalam berbagai aktivitas publik. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dapat memperkuat ketimpangan sosial karena kelompok tertentu tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, pemenuhan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas menjadi langkah penting dalam mendukung kesetaraan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi yang inklusif.

Aksesibilitas informasi memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas. Ketersediaan informasi yang mudah dipahami dan dijangkau memungkinkan kelompok disabilitas memperoleh pemahaman mengenai hak politik, tata cara pemilu, serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap informasi dapat menghambat proses pemahaman tersebut sehingga berdampak pada rendahnya keterlibatan dalam aktivitas politik dan demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aksesibilitas informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan media komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menemui berbagai kendala dalam memperoleh informasi kepegiluan. Informan tunanetra menjelaskan bahwa sebagian informasi digital belum sepenuhnya dapat diakses melalui aplikasi pembaca layar sehingga terdapat informasi tertentu yang sulit dipahami secara mandiri. Akibatnya, mereka masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memperoleh informasi secara lengkap. Sementara itu, informan tunarungu mengungkapkan bahwa tidak semua konten video dilengkapi bahasa isyarat maupun teks pendukung yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian informasi yang disampaikan melalui media audiovisual belum dapat diterima secara optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa tersedianya informasi tidak selalu menjamin kemudahan akses bagi seluruh kelompok masyarakat.

Pengalaman para informan menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan informasi, melainkan juga menyangkut kesesuaian format informasi dengan kebutuhan pengguna. Ketika media komunikasi belum dirancang secara inklusif, penyandang disabilitas berpotensi mengalami hambatan dalam memahami informasi kepegiluan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada proses penerimaan informasi, tetapi juga pada tingkat keterlibatan mereka dalam pengawasan pemilu dan kehidupan demokrasi secara umum.

Upaya memperkuat komunikasi publik dan pengawasan partisipatif juga menjadi salah satu fokus kebijakan Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 [15]. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pengembangan media informasi yang ramah disabilitas perlu menjadi perhatian dalam strategi komunikasi publik lembaga pengawas pemilu. Kehadiran media yang inklusif dapat memperluas ruang partisipasi kelompok disabilitas sekaligus mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih partisipatif.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran informasi publik di Indonesia. Jika sebelumnya informasi lebih banyak disampaikan melalui cara-cara konvensional, saat ini website, media sosial, dan berbagai platform digital menjadi sarana utama dalam komunikasi publik. Perubahan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi politik secara cepat dan luas. Bagi lembaga publik, media digital juga menjadi instrumen penting dalam menyampaikan informasi mengenai pendidikan demokrasi, pengawasan pemilu, serta berbagai kegiatan kelembagaan lainnya.

Di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Tidak semua individu memiliki kemampuan maupun fasilitas yang sama dalam mengakses teknologi digital. Keterbatasan fitur aksesibilitas dan kurangnya dukungan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna disabilitas menyebabkan sebagian kelompok masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan media digital secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital yang berdampak pada ketidakmerataan akses informasi.

Kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan teknologi, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Masih minimnya penggunaan bahasa isyarat, audio, teks alternatif, maupun desain media yang aksesibel menunjukkan bahwa sebagian informasi publik belum dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan demokrasi digital perlu disertai dengan prinsip inklusi sosial agar teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan yang sudah ada.

Dalam perspektif sosiologi, media digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan telah menjadi ruang sosial yang memengaruhi pola interaksi dan partisipasi masyarakat. Kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan informasi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam kehidupan politik. Sebaliknya, keterbatasan akses digital dapat mendorong terjadinya marginalisasi sosial maupun politik terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, aksesibilitas informasi digital menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Kondisi tersebut menuntut lembaga publik untuk tidak hanya berfokus pada kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga pada kualitas aksesibilitas informasi yang disediakan. Informasi yang dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat akan membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan partisipasi politik dan penguatan demokrasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media digital berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila didukung oleh kemampuan literasi digital yang memadai.

Dalam kerangka demokrasi inklusif, akses terhadap informasi merupakan bagian dari pemenuhan hak politik warga negara. Demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu, tetapi juga melalui kesempatan yang setara untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam proses politik. Ketika sebagian kelompok masyarakat mengalami hambatan dalam mengakses informasi, maka ketimpangan partisipasi sosial dan politik berpotensi semakin besar.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi publik yang inklusif mampu memperkuat hubungan antara lembaga publik dan masyarakat. Penyampaian informasi yang terbuka dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Selain itu, aksesibilitas informasi turut mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu karena setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasinya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Rahman yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses informasi publik. Hasil penelitian Putri dan Widodo juga memperlihatkan bahwa keterbatasan akses informasi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik kelompok disabilitas dalam pemilu. Selain itu, Wahyuni dan Lestari menegaskan bahwa komunikasi publik yang inklusif merupakan unsur penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan aksesibilitas tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan media komunikasi, tetapi juga oleh belum optimalnya strategi komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Lembaga publik masih cenderung menggunakan pendekatan komunikasi yang bersifat umum sehingga kebutuhan spesifik penyandang disabilitas belum sepenuhnya terakomodasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dalam merancang komunikasi publik yang inklusif.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan komunikasi publik yang inklusif dapat berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang lebih setara dan partisipatif. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi komunikasi dan sosiologi politik yang membahas hubungan antara akses informasi dan partisipasi demokrasi. Dari sisi praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengawas pemilu dalam mengembangkan media komunikasi yang lebih aksesibel. Sementara itu, dari sisi kebijakan, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pelayanan informasi publik yang ramah disabilitas guna mendukung demokrasi inklusif di Indonesia.

Untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas. Penyediaan format informasi alternatif, pengembangan media yang ramah disabilitas, serta peningkatan pemahaman lembaga terhadap kebutuhan pengguna menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan akses informasi. Selain itu, kerja sama dengan komunitas disabilitas perlu diperkuat agar penyediaan informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan komunikasi publik yang lebih inklusif, penyandang disabilitas diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi secara setara.

D. KESIMPULAN

Ketersediaan informasi kepegiluan yang mudah diakses oleh seuruh kelompok masyarakat menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan demokrasi yang memberikan ruang partisipasi yang setara. Penyebaran informasi kepegiluan di kota Surabaya dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi publik yang dikembangkan oleh Bawaslu agar informas dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, seperti melalui website resmi, media

sosial, dokumentasi kegiatan, serta sosialisasi pengawasan pemilu. Pemanfaatan media digital tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi politik secara lebih cepat dan luas sehingga dapat mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Namun demikian, aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas masih belum berjalan secara optimal. Hambatan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fitur aksesibilitas pada media digital, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya perhatian terhadap kebutuhan kelompok disabilitas dalam praktik komunikasi publik. Minimnya penggunaan bahasa isyarat, audio, teks alternatif, serta media komunikasi yang ramah disabilitas menyebabkan informasi kepelembuan belum sepenuhnya dapat diakses secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat. Selain itu, rendahnya kemampuan literasi digital dan keterbatasan fasilitas teknologi juga menjadi faktor yang memperkuat kesenjangan akses informasi bagi penyandang disabilitas.

Dalam perspektif sosiologi, keterbatasan akses informasi dapat memunculkan eksklusif sosial dan ketimpangan partisipasi politik di tengah masyarakat. Penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam memperoleh informasi akan menghadapi kesulitan dalam memahami proses demokrasi dan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, aksesibilitas informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan media komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan kesetaraan sosial dan perlindungan hak politik masyarakat dalam demokrasi.

Perkembangan demokrasi digital perlu diimbangi dengan penguatan komunikasi publik yang lebih inklusif. Lembaga publik tidak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pengembangan media komunikasi yang ramah disabilitas, peningkatan literasi digital, pelatihan komunikasi inklusif, serta kerja sama dengan komunitas disabilitas menjadi langkah penting dalam menciptakan akses informasi yang lebih setara.

Penguatan aksesibilitas informasi dapat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia. Komunikasi publik yang inklusif tidak hanya mendukung keterbukaan informasi, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih setara antara lembaga publik dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Hidayat dan Y. Nugroho, "Inklusi sosial dalam kebijakan publik di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 14, no. 1, hlm. 45–60, 2020.
- [2] E. Kurniawati dan D. Sari, "Aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2, hlm. 89–102, 2022.
- [3] B. Setiawan dan H. Pratama, "Digitalisasi informasi publik dan tantangan aksesibilitas," *Jurnal Komunikasi Digital*, vol. 3, no. 1, hlm. 55–70, 2023.
- [4] World Health Organization, *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press, 2021.
- [5] R. Nugroho, "Kebijakan publik dan inklusi sosial di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 1, hlm. 15–27, 2021.

- [6] N. Fitria dan A. Rahman, “Aksesibilitas informasi publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, vol. 10, no. 2, hlm. 123–135, 2021.
- [7] A. Putri dan S. Widodo, “Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu,” *Jurnal Politik Indonesia*, vol. 5, no. 2, hlm. 101–115, 2020.
- [8] S. Wahyuni dan R. Lestari, “Komunikasi inklusif dalam pelayanan publik,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 10, no. 2, hlm. 200–212, 2021.
- [9] J. Habermas, *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, 1984.
- [10] P. Bourdieu, “The forms of capital,” dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, J. Richardson, Ed. New York: Greenwood, 1986, hlm. 241–258.
- [11] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi ke-5. California: SAGE Publications, 2018.
- [12] D. Iskandar, “Peran komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 17, no. 1, hlm. 67–78, 2019.
- [13] United Nations Development Programme, *Inclusive Governance for Persons with Disabilities*. New York: UNDP, 2020.
- [14] Organisation for Economic Co-operation and Development, *Governance for Inclusive Growth*. Paris: OECD Publishing, 2019.
- [15] Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029*. Jakarta, Indonesia: Bawaslu RI, 2025.